

**Akselerasi Daya Saing Regional Menuju Keunggulan yang
Berkelanjutan
Kasus: Kabupaten dan Wilayah di Indonesia**

Wilson Rajagukguk
Program Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia
Jl. Diponegoro 84 - 86, Jakarta Pusat, 10430
Email: wrajagukguk@yahoo.com

ABSTRACT

The management of a country does not differ much from the management of a company. The greatest similarity between the two is on the architect of them. With the company and business organization, the leadership must manage the managers, workers, union, shareholders, and creditors. The same thing happens with a democratic country. Political leaders must manage government offices, people's representatives, law enforcement officers, political parties, lobbying and bureaucracy, and acts for their constituents' wills. The main objective of managers is to do the best according to the shareholders' wills, while the main objective of political leaders is to do the best for people's welfare in the leadership regions. How and in which development areas do the regional governments implement competitiveness acceleration in order to achieve sustainable excellence in Indonesia?

The objective of this research is to investigate the effects of competitiveness acceleration on sustainable excellence in government areas in Indonesia. The research is done at district and province level in Indonesia. The sustainable excellence variable is the gross domestic product (GDP), while the competitiveness acceleration variables are the capital investment, percentage share of agriculture in the economy, human capital investment (gender equality in education) by gender, and labor participation rate. Data used cover 489 districts in Indonesia from 2008 to 2010. The data are from Statistics Indonesia.

Data analysis using an ordinary least square regression show that to achieve a sustainable excellence, regional management (regional governments) must promote the regional competitiveness acceleration by increasing the capital investment, reducing the share of agriculture sector in the economy, increasing gender equality development, and increasing the labor participation rate.

Key words: competitiveness, government management, competitiveness acceleration, district and province, Indonesia.

ABSTRAK

Mengelola sebuah negara tidak terlalu jauh berbeda dari mengelola sebuah perusahaan. Persamaan yang paling besar dalam manajemen sebuah negara dan sebuah perusahaan terletak pada rancangan arsitek keduanya. Pada perusahaan dan organisasi bisnis, pemimpin harus mengelola para manager, pekerja, serikat, pemegang saham, dan kreditor. Hal yang sama terjadi pada negara demokratis. Pemimpin politik harus mengelola kantor pemerintahan, perwakilan rakyat, aparat penegak hukum, partai politik, lobi dan birokrasi, dan bertindak pada keinginan konstituen. Tujuan utama para manager adalah melakukan yang terbaik sesuai keinginan pemegang saham, sedangkan tujuan utama pemimpin politik melakukan yang terbaik demi kesejahteraan penduduk pada wilayah kepengimpinannya. Bagaimana dan pada bidang apa pemerintah daerah melakukan akselerasi daya saing demi tercapainya keunggulan berkelanjutan di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh akselerasi daya saing terhadap keunggulan berkelanjutan pada bidang pemerintahan di Indonesia. Penelitian dilakukan pada tingkat kabupaten dan provinsi di Indonesia. Variabel keunggulan berkelanjutan adalah produk domestik bruto (PDRB), sedangkan variabel daya saing terpilih adalah investasi modal (*capital investment*), kontribusi pertanian, investasi pembangunan gender dalam bidang pendidikan (*human capital investment*), dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Data yang digunakan mencakup 489 Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2008 dan tahun 2010. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (*ordinary least square*) menunjukkan bahwa untuk mendapatkan keunggulan berkelanjutan, manajemen wilayah (pemerintah daerah) perlu melakukan akselerasi daya saing regional pada bidang investasi modal kapital, investasi modal manusia, menurunkan kontribusi pertanian pada sektor ekonomi, melakukan pembangunan dalam bidang kesetaraan gender, dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Kata kunci: daya saing, manajemen pemerintah, akselerasi daya saing, kabupaten dan provinsi, Indonesia.

Pengantar

Denhardt dan Grubbs (2003) berkata bahwa perbedaan utama antara bisnis dengan pemerintahan adalah bahwa perhatian utama dunia usaha adalah menciptakan keuntungan, sementara pada sisi lain pemerintahan lebih mengarah pada penciptaan jasa atau mengatur perilaku individu dan kelompok dalam tujuan publik

Pada tahun 1802, Thomas Jefferson, penulis dari the *American Declaration of Independence*, ingin "melihat keuangan dari (negara) Kesatuan (Union) sejernih, mudah dipahami, dan sejelas sebuah buku dagang," (Chan, 2009). Pada tahun 1970 an, Arthur Andersen & Co., sebuah perusahaan akuntansi inovatif, mencoba merealisasikan mimpi Jefferson's dengan menantang pemerintah Amerika Serikat membuat akuntansinya sesuai dengan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Pada tahun 1980 an, Robert Anthony (dalam Chan, 2009) mendorong supaya Amerika Serikat dan juga Negara-negara Bagian menggunakan prinsip akuntansi bisnis sehingga tidak perlu menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbeda. Pada tahun 1990 an, pendekatan "*business accounting for government*" telah berhasil dilakukan

pada tingkat internasional. *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* berhasil dibuat setelah standar akuntansi bisnis internasional dikembangkan.

Dalam koridor nasional, luaran pembangunan antar kabupaten/kota di Indonesia mempunyai variasi sangat besar. Tabel 1 memperlihatkan bahwa terjadi ketimpangan pada bidang PDRB, Penanaman Modal Tetap Bruto, Kontribusi Pertanian, Perempuan berpendidikan SMA ke Atas, Angka Pertumbuhan Angka Ketergantungan. Bagaimana kabupaten/kota tertinggal berkembang dapat mengejar ketertinggalan ini?

Jan Fagerberg, Mark Knell dan Martin Srholec (2014) bertanya mengapa beberapa wilayah bertumbuh begitu cepat, dan mempunyai perdagangan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain? Apa faktor krusial di balik keberhasilan ini?, kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonominya (atau kesejahteraan dari penduduknya)?. Hal ini merupakan jenis pertanyaan yang mendorong perhatian pada daya saing sebuah ekonomi diantara sejumlah pilihan pembangunan, inovasi dan daya saing merupakan satu kunci yang paling penting untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi (Gu & Tang, 2003).

Couto, Vieira, Tiago & Natário (2006) seperti dikutip oleh Vieira dkk. (2008) berkata bahwa daya saing tergantung, dalam skala luas, yakni kemampuan menciptakan sebuah momentum kesempatan kerja yang baik, yang juga merupakan isu yang berkenaan dengan dinamika demografi, keterbatasan pasar tenaga kerja, kualifikasi sumber daya manusia dan pencapaian produktivitas..

Apakah daya saing? Porter (1990) mendefinisikan

"the only meaningful concept of competitiveness at the national level is productivity. The principal goal of a nation is to produce a high and rising standard of living for its citizens. The ability to do so depends on the productivity with which a nation's labor and capital are employed. Productivity is the value of the output produced by a unit of labor or capital"

Dalam hal region, Huggins dkk (2013) mendefinisikan bahwa daya saing merupakan kapasitas dan kemampuan sebuah wilayah untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi relatif pada daerah lain pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang setara secara keseluruhan. Daya saing tergantung pada produktivitas jangka panjang, dimana sebuah negara atau wilayah menggunakan sumber daya manusia, modal, dan sumber daya alamnya. Keragaman dalam daya saing juga menjadi faktor penyebab ketimpangan diantara negara-negara berkembang. Daya saing eksternal atau daya saing internasional merupakan kemampuan untuk mengubah kelimpahan barang dan jasa di negaranya menjadi barang dan jasa yang langka di negara lain. (BEST, 1990, 2001) berkata bahwa daya saing: negara, kota, wilayah, tidak lagi merupakan sebuah pilihan tetapi harus berkompetisi agar dapat bertahan hidup pada jaman pasar bebas global dan 'kompetisi baru' ditempa melalui ekonomi informasi baru (*new information economy*) dan ekonomi yang didorong oleh ilmu pengetahuan (*knowledge driven economy*)

Daya saing merupakan satu-satunya rute untuk mendapatkan pertumbuhan lapangan kerja berkesinambungan, memperbaiki pendapatan merulakan jalan untuk memperbaiki standar hidup. Potter (1990) berargumen bahwa dalam ekonomi global modern, kemakmuran sebuah ekonomi merupakan kemampuan sebuah ekonomi tersebut melakukan inovasi untuk mencapai atau mempertahankan posisi yang menguntungkan atas negara lain dengan membangun pada sejumlah sektor industri kunci. Hämäläinen (2003) mengajukan sebuah kerangka pada daya saing dan pembangunan ekonomi dalam situasi teknologi-ekonomi (*techno-economic situation*). Temuan dari studi empiris pada 22 negara OECD pada tahun 1980 an dan 1990 an menunjukkan bahwa efisiensi dan pemerintah yang berorientasi pertumbuhan secara signifikan mempunyai dampak positif pada kinerja ekonomi negara mereka

Fagerberg et al. (2004) mengajukan kebijakan bahwa dengan peningkatan daya saing akan memperbaiki posisi ekonomi sebuah negara. Empat aspek yang berbeda diidentifikasi: teknologi, harga, kapasitas, dan permintaan. Hasil dari studi mereka menunjukkan bahwa daya saing teknologi dan daya saing kapasitas merupakan determinan penting dalam pertumbuhan kinerja daya saing.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Ben Amar dan Hamdi (2012) dengan menggunakan data panel pada 23 negara Afrika pada periode 2004-2009, menemukan bahwa daya saing global negara-negara ini positif dan secara statistik mempunyai dampak pada prekonomian mereka. Lebih lanjut, Kordalska dan Olczyk (2015) menemukan bahwa daya saing global berdampak pada tingkat pertumbuhan agregat dari negara-negara berpenghasilan rendah, mungkin diakibatkan oleh variabel antara seperti sejumlah besar reformasi ekonomi pada negara berpenghasilan rendah ini.

Gangl (2007) menyatakan bahwa mayoritas dari penduduk Amerika menyukai jika proses mekanisme pasar lebih meningkat pada proses politik atau pemerintahan demokratis dengan prinsip pasar bebas. Riset yang dilakukannya mengusulkan bahwa pemerintahan akan lebih efektif jika dijalankan sebagaimana halnya sebuah bisnis.

Ka Ho Mok (2015) menemukan untuk kasus Hong Kong berkata bahwa pendidikan merupakan mesin mobilitas sosial dalam masyarakat modern. Sesuai dengan temuan riset internasional (Mok, 2015) pada beberapa dekade terakhir bahwa pendidikan dapat mendorong mobilitas sosial dan mempengaruhi formasi kelas sosial. Pendidikan dan penduduk yang berpendidikan akan menghasilkan posisi yang lebih baik.

Harrison (1998) Inovasi teknologi (*technological innovation*) akan berdampak pada perkembangan berkelanjutan dan mengurangi kebutuhan perubahan sosioekonomi yang lebih luas. Pasar bebas telah meningkatkan kuantitas inovasi teknologi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sangatlah jelas bahwa inovasi teknologi sendiri berdampak pada perkembangan berkelanjutan. Pemerintahan harus dengan hati-hati menentuk dan bukan mengontrol sistem teknologi.

Kebijakan konvensional menganjurkan bahwa perkembangan berkelanjutan merupakan sebuah pengikat yang mempersatukan setiap orang dari industri berorientasi keuntungan (*profit-minded industrialist*) dan petani miskin yang berorientasi meminimalkan risiko

(*risk-minimizing farmer*) menjadi pekerja sosial pencari kesamaan (*equity-seeking social worker*), pemerhati polusi (*pollution-concerned*) atau pencinta kehidupan hewan liar (*wildlife-loving*), birokrat pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan (*growth-oriented bureaucrat*), dan menjadi politisi terpilih. Karena umat manusia dan peradaban telah mengembangkan sebuah budaya eksosomatik yang senantiasa memperbaiki kondisi umat manusia melalui artifak bahwa teknologi diturunkan dari imajinasi pengetahuan manusia. (Lele, 1991).

Boeri (2005) berkata bahwa keuntungan komparatif dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah melalui peningkatan rata-rata tingkat pendidikan tenaga kerja (hampir mekanis) dan transformasi ekonomi yang dilakukan menjadi padat modal (*capital intensive*) dengan menggunakan tabungan pensiun.

Pada tahun 2010, Uni Eropa mengumumkan sebuah strategi yang disebut sebagai "Europe 2020 Strategy" dengan tiga pendorong ekonomi pada dekade mendatang: smart growth (mendorong peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi, pendidikan dan sebuah masyarakat digital), *sustainable growth* (kebijakan dalam meningkatkan produksi yang lebih efisien dalam bidang sumber daya dan mengembangkan daya saing) dan *inclusive growth* (meningkatkan partisipasi semua, termasuk perempuan dalam pasar kerja, meraih keahlian dalam bidang pendidikan dan perjuangan terhadap mengurangi kemiskinan). Untuk mendapatkan pertumbuhan berkelanjutan sebuah region diperlukan kebijakan mengembangkan daya saing. Daya saing merupakan salah satu faktor yang memungkinkan sebuah negara/region mengejar ketertinggalannya dari negara maju,

Krugman (1994) berpikir bahwa dalam hal mendefinisikan daya saing dalam bidang pemerintahan regional berbeda dengan perusahaan. Akan tetapi terdapat sebuah tingkat daya saing tertentu dalam area teritori yang potensial untuk mendapatkan pertumbuhan berkelanjutan (Poot, 2000) khususnya dalam standar hidup penduduk. Hal ini didapat dengan mengembangkan daya saing regional. Artinya agar sebuah negara dapat meraih pertumbuhan berkelanjutan maka negara tersebut dapat meningkatkan daya saing. Penelitian ini daya saing dapat diterjemahkan dalam hal investasi, pengurangan kontribusi sektor pertanian, peningkatan sumber daya manusia khususnya melalui investasi dalam pendidikan perempuan untuk mengurangi ketimpangan gender, dan meningkatkan besarnya kesempatan kerja (*employment*) melalui penurunan Angka Ketergantungan

DATA DAN METODE

Data

Data dalam penelitian ini didapat dari Badan Pusat Statistik, Indonesia. tahun 2008 dan 2010. Data tersebut terdapat untuk sejumlah 489 Kabupaten/Kota di Indonesia. Data mencakup PDRB 2010 (ADHB) dalam Juta Rupiah, Penanaman Modal Bruto 2008 (ADHB) dalam Juta Rupiah, Kontribusi sektor Pertanian (%), Perempuan berpendidikan SMA ke Atas usia 16 tahun ke atas (%), dan Angka Pertumbuhan Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Tabel 1.
 Variabel, (banyak) Observasi, Rata-rata, Deviasi Standar, Minimum, dan Maksimum,
 2008-2010

Variabel	Observasi	Rata-rata	Deviasi Standar	Minimum	Maksimum
PDRB 2010 (Juta Rp.)	489	4,65e+07	5,19e+07	507019,5	2,99e+08
Penanaman Modal Tetap Bruto (Juta Rp.) 2008	489	3,58e+07	4,17e+07	323629,7	2,42e+08
Kontribusi Pertanian	489	0,3166689	0,1855197	0,0001627	0,7767885
Perempuan berpendidikan SMA ke Atas (usia 16 th +)	489	25,10881	12,81881	0,5024734	69,38169
Angka Pertumbuhan Angka Ketergantungan (Dependecy Ratio)	489	-,0069467	,0349846	-0,1325966	0,1145932

Sumber: diolah

Angka Ketergantungan mengukur persentasi penduduk yang tergantung (*dependent people* atau penduduk yang tidak bekerja) dibagi jumlah penduduk yang bekerja. Atau dengan kata lain Angka Ketergantungan dapat dituliskan dalam rumus

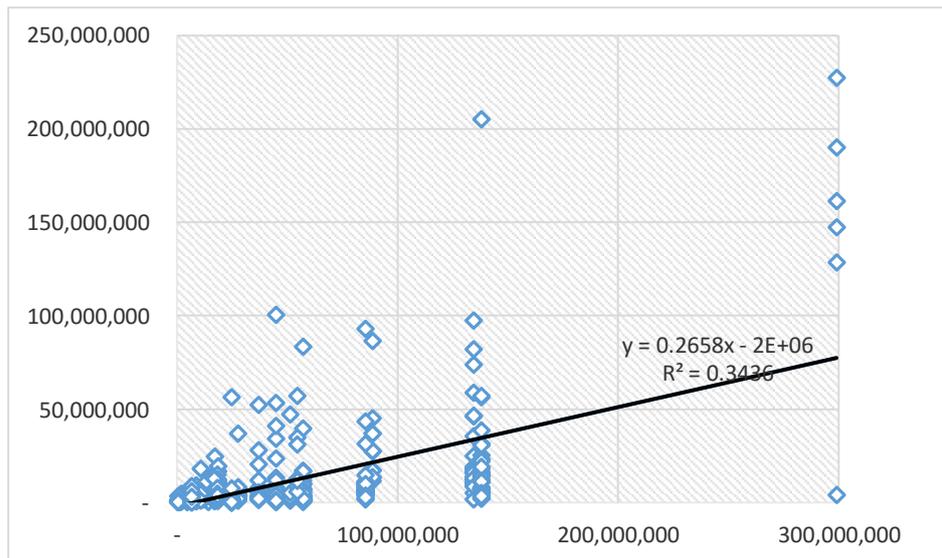
$$AK = AK = \frac{\text{Jumlah Penduduk berumur (0 - 15)} + \text{Jumlah Penduduk (65 + +)}}{\text{Kumlah penduduk berumur 16 - 65}}$$

Metode

Metode penelitian/pengolahan data dilakukan dengan Regresi Linier Sederhana dan Regresi Multinomial. Hasil metode Regresi Sederhana disajikan dalam grafik dua dimensi. Hasil metode Regresi Multinomial disajikan dalam tabel.

Hasil Analisis

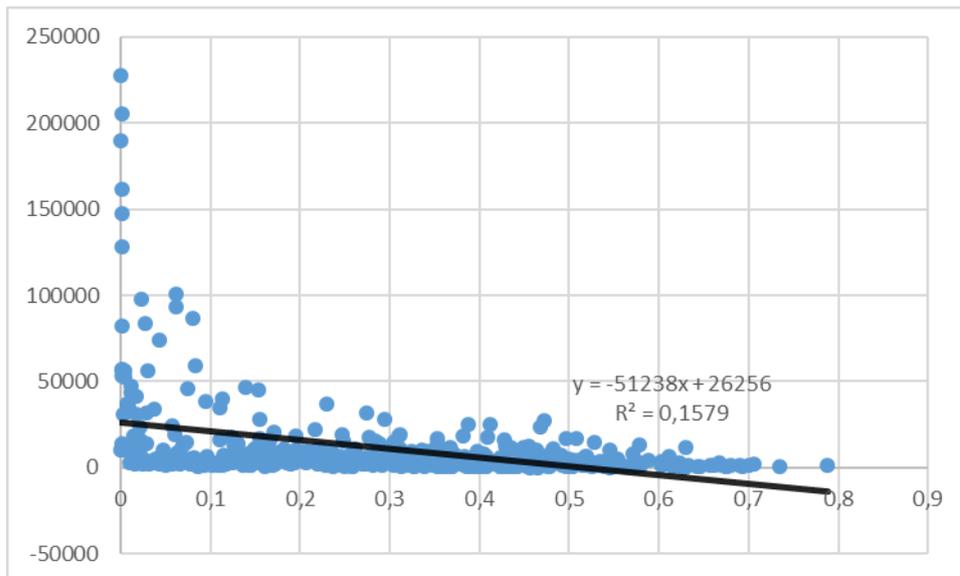
Gamba 1 menunjukkan bahwa Penanaman Modal Bruto/Investasi 2008 (ADHB) dalam Juta Rupiah berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi (PDRB, 2010). Telihat bahwa setiap peningkatan Rp. 1 juta Investasi pada tahun 2008, ceteris paribus, akan berdampak pada kenaikan PDRB sebesar Rp. 0,2658 pada tahun 2010.



Sumber: diolah

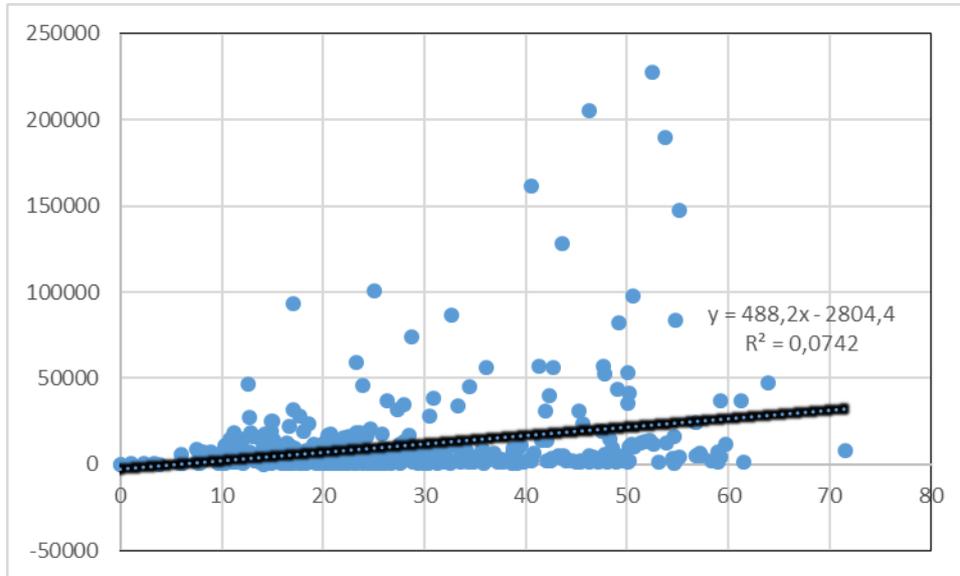
Gambar 1
PDRB dengan Investasi: Kabupaten/Kota, Indonesia. 2008-2010

Pada Gambar 2 diperlihatkan hubungan antara kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB (2010). Peningkatan kontribusi ekonomi dari Sektor Pertanian menurunkan PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia.

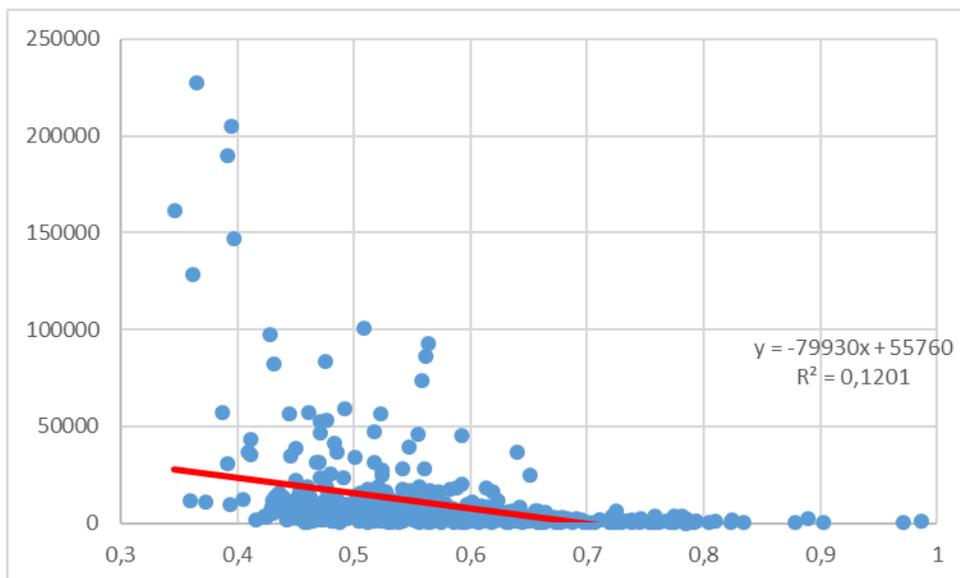


Gambar 2
PDRB dengan Sumbangan Sektor Pertanian, Kabupaten/Kota, Indonesia, 2008-2010

Pada Gambar 3 ditunjukkan dampak dari pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan 1% perempuan berumur 16 ke atas dalam pembangunan bidang pendidikan SMA ke atas, berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.



Gambar 3
**Pertumbuhan Ekonomi dengan Persentase Perempuan SMA ke atas 16+,
Kabupaten Kota, Indonesia, 2008-2010.**



Gambar 4
**Pertumbuhan Ekonomi terhadap Angka Ketergantungan, Kabupaten Kota
Indonesia, 2008-2010**

Pada Gambar 4 ditunjukkan hubungan angka pertumbuhan Angka Ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar pertumbuhan Angka Ketergantungan semakin rendah pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Hasil regresi Multinomial ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut

Tabel 2
Variabel, Koefisien, Standar Error, t, dan p-value

Variabel	Koefisien	Standar Error	t	p-value
Konstanta	-2555,978	4302,651	-0,59	0,553
Penanaman Modal Tetap Bruto (Juta Rp.)	0,2372	0,0000178	13,30	0,000
Kontribusi Pertanian	-17922,19	6527,592	-2,75	0,006
Perempuan berpendidikan SMA ke Atas (usia 16 th +)	293,6888	88,52	3,32	0,001
Angka Pertumbuhan Dependency Ratio	-64287,49	25081,75	-2,56	0,11

Jumlah observasi : 456, $F(4,451) = 79,64$; $\text{Prob} > F = 0,0000$, $R\text{-squared} = 0,4139$

Sumber: diolah

TEMUAN/KESIMPULAN

Hasil pengolahan data dengan *Metode Ordinary Least Square* menunjukkan bahwa Variabel Penanaman Modal Tetap Bruto (investasi), Kontribusi sektor Pertanian, Persentase Perempuan berumur 16 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas, dan Angka Pertumbuhan Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi, Setiap Penanaman Modal Tetap Bruto (Investasi), sebesar 1 juta rupiah, akan menaikkan PDRB sebesar 0,2372 juta rupiah, Hal ini sesuai dengan teori mendasar Keynes bahwa salah satu faktor peningkatan output adalah melalui peningkatan investasi,

Sektor Pertanian berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia, Setiap penurunan 1% kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian, akan berdampak pada kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 17.922,19 Juta Rupiah,

Diao (2010) mengatakan bahwa luaran dari transformasi ekonomi di beberapa negara Asia mempunyai karakter terjadinya penurunan peranan sektor pertanian dalam PDB dan dilanjutkan dengan peningkatan peranan sektor manufaktur, Sektor manufaktur ini kemudian memegang peranan utama dalam proses transformasi ekonomi, Hal yang sama terjadi pada Kabupaten Kota di Indonesia, Kebijakan mendorong transformasi ekonomi, mengubah pertanian menjadi industri atau meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur,

Pendidikan memegang peranan sangat penting dalam pembangunan, Setiap kenaikan satu persen perempuan berumur 16 tahun ke atas yang menamatkan SMA ke atas berdampak pada peningkatan PDB sebesar

Peningkatan satu persen angka Pertumbuhan Angka Ketergantungan (*dependency ratio*) akan menurunkan Kabupaten/Kota di Indonesia sebesar 64.287,49 juta Rupiah. Angka ketergantungan ini berdampak sangat besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. mengapa demikian? Samosir (2015) menemukan dampak ekonomi dari Angka

Ketergantungan. Sebuah Angka Ketergantungan yang lebih tinggi cenderung menurunkan pertumbuhan produktivitas. Sebuah pertumbuhan dalam penduduk yang tidak produktif akan mengurangi kapasitas produktif dan dapat berdampak pada sebuah angka runtun waktu pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah gagal mengatasi isu yang berkaitan dengan sebuah Angka Ketergantungan yang lebih tinggi, akan berakibat pada tekanan fiskal pemerintah, mendorong pinjaman yang lebih tinggi akan tingkat pajak yang lebih besar yang juga akan mengurangi pertumbuhan ekonomi

SARAN KEBIJAKAN

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia dapat diraih dengan meningkatkan daya saing melalui variabel antara. Variabel antara adalah Investasi, Kontribusi Pertanian, Kesetaraan Gender melalui peningkatan pendidikan perempuan, dan Angka Ketergantungan. Pembangunan dalam keempat variabel ini merupakan peningkatan daya saing sebuah negara. Disarankan agar pembuat kebijakan, semua pemangku kepentingan dapat melakukan pembangunan dalam keempat bidang tersebut di atas. Investasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penurunan kontribusi pertanian dalam perekonomian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendidikan perempuan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan pembangunan dalam bidang angka ketergantungan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertumbuhan dalam jangka panjang. Pertumbuhan jangka panjang dapat diraih

DAFTAR PUSTAKA

- Beckett, Julia, 2000, The "Government Should Run Like a Business" Mantra, *American Review of Public Administration*, Vol 2, Pp, 185 – 204.
- Ben Amar, Mohamed dan Mohamed Tlili Hamdi. (2012). Global Competitiveness and Economic Growth: Empirical Verification for African Countries. *International Journal of Economics and Finance*. Vol. 4, No. 6, June 2012, pp. 125-131.
- Best, M., (1990) *The New Competition*, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Best, M., (2001) *The New Competitive Advantage: The Renewal of American Industry*, Oxford: Oxford University Press.
- Boeri, Tito, 2005, Trends And Problems Of The World Population Inthe Xxi Century, 50 years since Rome 1954, *Università degli Studi di Roma "La Sapienza, Genus*, Vol, 61, No, 3/4, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/29789274>, Accessed: 09-06-2016 15:17 UTC.
- Chan, James L, 2009, *Private und öffentliche Rechnungslegung: A Comparison of Government Accounting and Business Accounting*, Gabler | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, pp 61-73.
- Denhardt, R.B., Joseph W. Grubbs, J.W., (2003), *Public Administration: An Action Orientation*, Fourth Edition, P.6, Thomson Wadsworth, 2003.

- Diao, Xinshen., 2010, *Economic Importance of Agricultural for Sustainable Development and Poverty Reduction: Findings from a Case Study of Ghana*, OEC, Paris.
- Fagerberg, J., M. Knell, and M. Srholec. (2004). *Competitiveness of Countries: Economic Growth in the ECE Region*. Paper prepared for presentation at the UNECE Spring Seminar, *Competitiveness and Economic Growth in the ECE Region*, Geneva, February 23, 2004.
- Gangl, Amy, 2007, *Examining citizens' beliefs that government should run like business*, *International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)*, DOI: 10.1093/poq/nfm043
- Georgescu-Roegen, N., 1975, "Energy and Economic Myths," *Southern Economic Journal* 41:347-81.
- Gu, W. & Tang, J. (2003): "The link between innovation and productivity in canadian manufacturing industries"; Working Paper No. 38. Industry Canada Research Publications Program.
- Hämäläinen, Timo J. (2003). *National Competitiveness and Economic Growth. The Changing Determinants of Economic Performance in the World Economy*. New Horizons in Institutional and Evolutionary Economics series. Edward Elgar Publishing.
- Harrison, N,E, 1998, *Why Science and Technology Require Political Guidance to Sustain Development, Politics and the Life Sciences*, PLS, 17(2), 179-188, Beech Tree Publishing, 10 Watford Close, Guildford, Surrey GUI 2EP, UK.
- Kordalska, A. M. and M. Olczyk. (2015). *Global Competitiveness and Economic Growth: A One-Way or Two-Way Relationship?* Institute of Economic Research Working Papers No. 63/2015.
- Krugman, P.,1994, *Competitiveness: A Dangerous Obsession*. *Foreign Affairs*, 73(2), 28-44.
- Lele, S,M.,1991, "Sustainable Development: A Critical Review," *World Development* 19 (6):607-21
- Maskell, P., & Eskelinen, H.,1998, *Competitiveness, Localised Learning and Regional Development: Specialization and Prosperity in Small Open Economies*. London : Routledge.
- Mok, Ka Ho, 2015, *Enhancing Global Competitiveness and Human Capital Management: Does Education Help Reduce Inequality and Poverty in Hong Kong?*, Chinese University Press, *China Review*, Vol, 15, No, 2, Special Issue: Poverty in a Rich Society—The Case of Hong Kong (Fall 2015), pp, 119-146.
- Poot, J. ,2000, *Reflections on Local and Economy- Wide Effects of Territorial Competition*. In: BATEY, P. – FRIEDRICH, P.: *Regional Competition*, Springer.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York NY: Free Press.
- Robert B, Denhardt, R,B, dan Grubbs, Joseph W., 2003, *Public Administration: An Action Orientation*, Fourth Edition, P,6, Thomson Wadsworth.

- Samosir, O.B., 2015, Literasi Dinamika Kependudukan dan Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Serta Pemanfaatannya untuk Perencanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Simon, J.L., 1998, *The Ultimate Resource 2*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Szentes, Tamás, 2005, Interpretations, Aspects And Levels, Decisive Factors And Measuring methods Of Competitiveness, *Society and Economy*, Vol, 27, No, 1 (2005), pp, 5-41, Akadémiai Kiadó, Source: Published by: Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/41472014> Accessed: 09-06-2016 15:24 UTC.
- Vieira, E., Vazquez-Rozas, E., dan Neira, I. (2008), The innovation factor: an econometric model of productivity in european regions. *Regional and Sector Economic Studies* Vol. 8-1.